

RENCANA AKSI TAHUNAN (RAT) PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026



**SEKRETARIAT TKPKD
KABUPATEN SIKKA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan Bimbingan_Nya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama pembangunan di Kabupaten Sikka. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni, kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2020, tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, maka dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sikka Tahun 2025, dengan Keputusan Bupati Nomor 323/HK/2025. Salah satu tugas TKPK Kabupaten Sikka adalah sebagai penyusun RAT. Rencana aksi ini secara garis besar memuat strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka pada tahun 2026 termasuk program penanggulangan kemiskinan yang akan dijalankan Perangkat Daerah pemangkunya serta pagu anggaran indikatif. Dengan adanya rencana aksi ini diharapkan target penurunan kemiskinan dapat terwujud dan disparitas kemiskinan semakin mengecil.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas setiap upaya yang dilakukan dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sikka. Kolaborasi dan sinergi dengan berbagai stakeholder harus terus dibangun dan dioptimalkan. Akhirnya, semoga RAT Kabupaten Sikka Tahun 2026 ini bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya serta secara khusus berguna bagi Pemerintah Kabupaten Sikka. Semoga dokumen ini bisa menjadi panduan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka dalam upaya merealisasikan percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sikka guna terpenuhinya Masyarakat Sikka yang produktif, kreatif, unggul dan mandiri menuju Maumere Baru.

Maumere, 28 Februari 2026
Bupati Sikka

Juventus Prima Yoris Kago

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2025	5
2.1. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Sikka	6
2.2. Evaluasi Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025	10
BAB III RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2026	34
3.1. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2026	34
3.2. Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026.....	35
3.3. Hambatan dan Tantangan terhadap Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026.....	47
BAB IV PENUTUP	50
5.1. Kesimpulan	50
5.2. Rekomendasi	50

Lampiran

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Matriks Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2025.....	11
Tabel 3.1. Matriks Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2026	37

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sikka Tahun 2021 – Tahun 2025	6
Grafik 2.2. Posisi relatif persentase penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025	7
Grafik 2.3. Garis Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2021–2025.....	7
Grafik 2.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2021–2025	9
Grafik 2.5. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2021–2025	10

Rencana Aksi Tahunan (RAT)

Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten Sikka

Tahun 2026



BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang**
- 1.2. Maksud dan Tujuan**
- 1.3. Landasan Hukum**
- 1.4. Sistimatika Penulisan**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Definisi kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik Indonesia adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut Bank Dunia, kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang hidup dengan pendapatan di bawah US\$ 2,15 per hari (standar internasional tahun 2017) sebelumnya menggunakan standar US\$ 1,90 per hari (standar internasional tahun 2011), atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum. Definisi kemiskinan menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) adalah kekurangan dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, tidak hanya pendapatan, tapi juga Pendidikan, kesehatan, akses terhadap layanan dasar, dan kualitas hidup secara umum.

Kemiskinan merupakan tantangan utama yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah yang berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja, keterbatasan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan, serta ketimpangan wilayah antar desa. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia juga berdampak karena keterbatasan akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur dasar. Penanganan masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan yang akan berdayaguna secara efektif jika penanganannya dilakukan lintas sektor dan menjadi tanggungjawab multipihak, serta terkoordinasi dengan baik, sehingga ada sinergi dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) dimana salah satu tujuan utama yang ingin dicapai didalamnya adalah Tanpa Kemiskinan, maka strategi penanggulangan kemiskinan harus terintegrasi dalam seluruh proses perencanaan pembangunan, baik dari sisi kebijakan, penganggaran, hingga pelaksanaan program di lapangan.

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah diperlukan penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran. Selain itu juga diperlukan koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan, dan penguatan kelembagaan di tingkat Nasional, di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten diharapkan mampu menjembatani setiap Satuan Kerja di lingkungannya untuk konsisten melakukan program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan daerah sehingga target pengurangan angka kemiskinan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan dapat tercapai.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kabupaten Sikka Tahun 2026 disusun dengan maksud :

1. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan TKPKD Kabupaten Sikka dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di tahun 2026;
2. Memberikan gambaran kondisi kemiskinan dan rencana aksi serta pelaksanaan koordinasi dalam implementasi intervensi program dan kegiatan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di tahun 2026;
3. Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
4. Memberikan gambaran harapan yang akan datang dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2026 adalah :

1. Sebagai bahan analisa dan konsolidasi internal Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sikka;
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan perencanaan tindak lanjut penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sikka;

3. Sebagai dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka.

1.3. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 20).

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2025

- 2.1. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Sikka
- 2.2. Evaluasi Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025

BAB III RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2026

- 3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026
- 3.2. Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026

3.3. Faktor Pendorong dan Hambatan terhadap Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

Rencana Aksi Tahunan (RAT)

Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten Sikka

Tahun 2025



BAB II

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2025

- 2.1. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Sikka**
- 2.2. Evaluasi Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025**

BAB II

EVALUASI KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

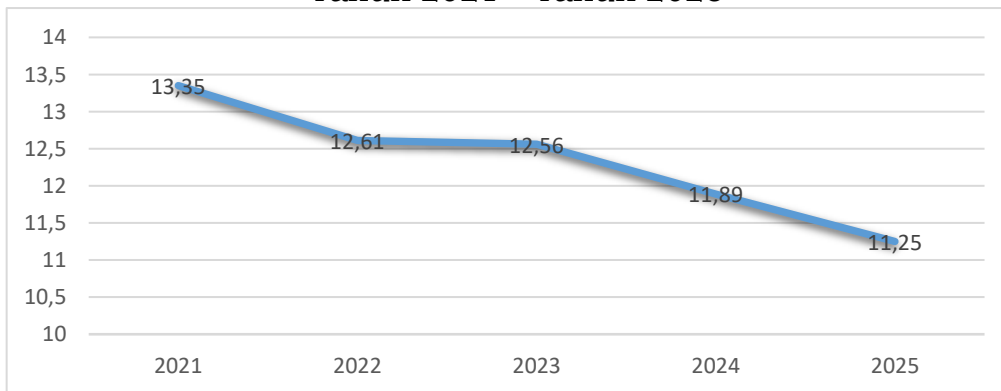
TAHUN 2025

2.1 Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Sikka

A. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sikka dalam rentang waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2021 sampai 2025 mengalami trend penurunan. Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik 2.1.

Grafik 2.1.
Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sikka
Tahun 2021 – Tahun 2025



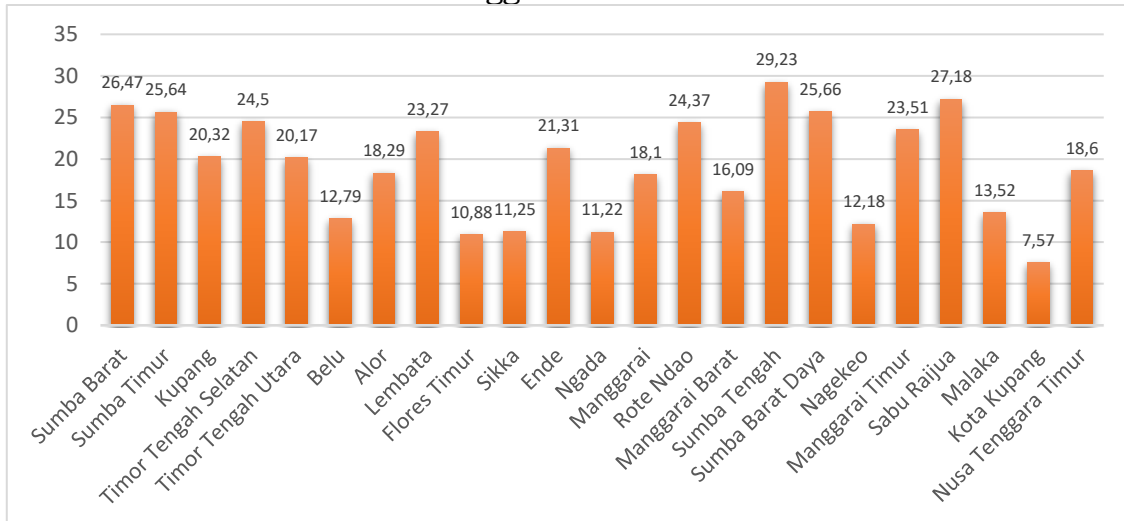
Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Grafik 2.1 menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sikka dalam rentang waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2021 sampai 2025 mengalami trend penurunan. Pada Tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sikka mengalami penurunan sekitar 1.990 jiwa menjadi 36.740 jiwa atau 11,25% dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 yaitu sebanyak 38.730 jiwa atau 11,89%.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga, posisi relatif persentase penduduk miskin di Kabupaten Sikka sebesar 11,25% berada dibawah Kabupaten Ende yaitu sebesar 21,31%, dan berada di atas Kabupaten Flores

Timur sebesar 10,88%. Posisi relatif persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik 2.2.

Grafik 2.2.
Posisi relatif persentase penduduk miskin
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025



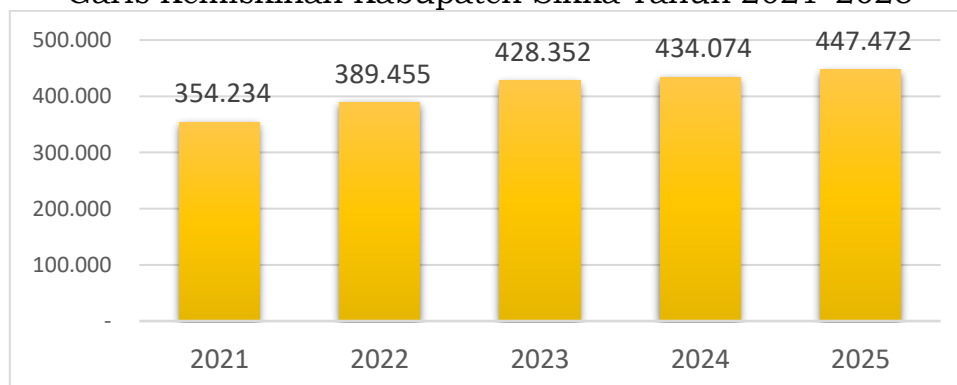
Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Grafik 2.2 menunjukkan rata-rata posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Sikka yaitu sebesar 11,25% berada diatas nasional sebesar 8,47%, dan berada dibawah provinsi sebesar 18,6%.

B. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan di Kabupaten Sikka dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik 2.3.

Grafik 2.3.
Garis Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2021–2025



Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

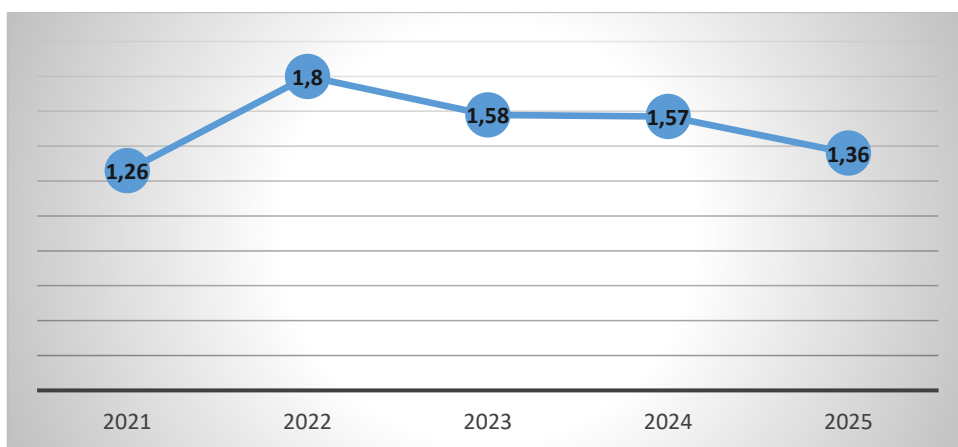
Selama 5 tahun terakhir, Kabupaten Sikka mencatat tren kenaikan garis kemiskinan yang konsisten. Pada tahun 2021, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp354.234 per kapita per bulan. Angka ini terus meningkat setiap tahun menjadi Rp389.455 di 2022, Rp428.352 pada 2023, Rp434.074 pada 2024 dan Rp447.472 pada tahun 2025. Meskipun garis kemiskinan meningkat (standar kebutuhan dasar naik), persentase penduduk miskin cenderung menurun menjadi 11,25% pada 2025, menandakan pemulihan ekonomi.

Tren naik ini didorong oleh meningkatnya standar pengeluaran minimum untuk makanan dan non-makanan, terutama pasca pandemi. Kenaikan garis kemiskinan yang konsisten menuntut kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran agar peningkatan standar hidup tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk miskin. hal ini menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa bantuan sosial, upah minimum, dan program pemberdayaan masyarakat perlu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan riil di lapangan. Jika tidak, ketimpangan sosial bisa semakin melebar, dan kelompok rentan semakin sulit keluar dari jerat kemiskinan.

C. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sikka tahun 2021 sampai tahun 2025 dapat dilihat pada grafik 2.4.

Grafik 2.4.
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2021–2025



Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

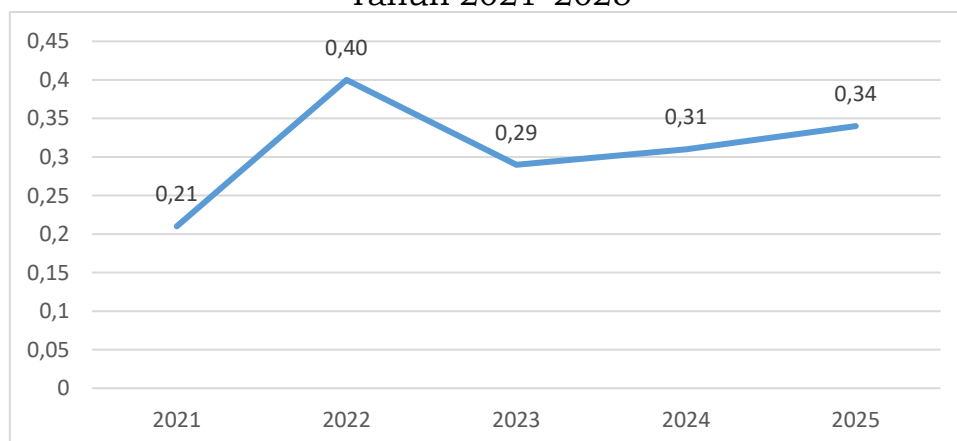
Grafik 2.4 menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sikka tahun 2023 sebesar 1,58 mengalami penurunan sebesar 0,01 menjadi 1,57 di tahun 2024 dan tahun 2025 menjadi 1,36. Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mendekat. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian penduduk miskin mengalami perbaikan kondisi ekonomi, dan lebih dekat untuk keluar dari status miskin apabila tren ini berlanjut.

D. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Sikka dari tahun 2021 sampai tahun 2025 dapat dilihat pada grafik 2.5.

Grafik 2.5.
Indeks Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Sikka
Tahun 2021–2025



Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Grafik 2.5 menunjukkan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Sikka tahun 2023 sebesar 0,29 mengalami peningkatan sebesar 0,02 menjadi 0,31 di tahun 2024 dan meningkat kembali menjadi 0,34 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa ketimpangan di antara penduduk miskin semakin melebar, yang berarti Sebagian kelompok miskin mengalami perbaikan, namun Sebagian lainnya khususnya kelompok sangat miskin semakin tertinggal. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi pengentasan kemiskinan yang lebih terarah dan inklusif, tidak hanya menyasar penduduk miskin secara umum tetapi juga menargetkan kelompok paling rentan dan sulit keluar dari kemiskinan ekstrem.

2.2 EVALUASI KINERJA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN

2024

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp 97.220.980.434,-. Anggaran tersebut melalui intervensi Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Matriks Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Strategi	Target 2025		Realisasi 2025		OPD Penanggungjawab
												Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	Pendidikan	Membangun dasar kebijakan dan sistem pelayanan SDM yang inklusif, responsif, dan berbasis nilai lokal.	Meningkatnya Intelektualitas dan Karakter Anak Usia Sekolah	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen Nasional (Nilai)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	336	33.787.073.840	335	33.565.397.390	PKO
2				Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen Nasional (Nilai)			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarana/prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	Unit	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	7	999.789.900	8	999.398.880	PKO
3				Rata-rata Kompetensi Literasi SMP berdasarkan asesmen Nasional (Nilai)			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat	Ruang	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	103	7.740.848.250	103	7.677.402.981	PKO
4				Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan asesmen Nasional (Nilai)			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi	Unit	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	8	635.928.800	8	603.970.000	PKO
5							Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana dan Prasarana dan utilitas sekolah	jumlah sarana/prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	Unit	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	2	172.360.000	2	172.051.000	PKO
6							Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	6	448.472.400	6	447.036.200	PKO

Sekretariat TKPK Kabupaten Sikka

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Strategi	Target 2025		Realisasi 2025		OPD Penanggungjawab
7							Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi	Unit	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan					PKO
8	Kesehatan	Membangun dasar kebijakan dan sistem pelayanan SDM yang inklusif, responsif, dan berbasis nilai lokal.	Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga	Usia Harapan Hidup	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kecamatan dengan fasilitas Kesehatan sesuai standar	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran					Dinkes
9				Jumlah Kematian Ibu (Orang)		Angka Kematian Bayi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran	4809	33.075.000	3.190	30.675.000	Dinkes
10				Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)		Persentase Desa/ Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran	4809	285.950.860	4.092	113.170.000	Dinkes
11				Prevalensi Stunting (%)		Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran	4562	55.280.000	4.000	10.280.000	Dinkes

Sekretariat TKPK Kabupaten Sikka

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Strategi	Target 2025		Realisasi 2025		OPD Penanggung jawab
12				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))		Prevalensi Obesitas > 18 tahun	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran					Dinkes
13				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (%)		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran					Dinkes
14				Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran					Dinkes
15				Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)		Persentase faskes terakreditasi Paripurna	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran	37204	59.270.000	31.066	10.960.000	Dinkes
16				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran					Dinkes

Sekretariat TKPK Kabupaten Sikka

No	Urusan Pemerintah / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Strategi	Target 2025		Realisasi 2025		OPD Penanggungjawab
							Kabupaten/ Kota									
17							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran					Dinkes
18							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran					Dinkes
19							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran					Dinkes
20							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran					Dinkes
21							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran	12	97.766.000	12	52.500.114	Dinkes

Sekretariat TKPK Kabupaten Sikka

No	Urusan Pemerintah / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Strategi	Target 2025		Realisasi 2025		OPD Penanggungjawab
							Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									
22							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran	125	4.360.000	125	4.360.000	Dinkes
23							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran	12	11.670.000	12	11.670.000	Dinkes
24							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran	12	578.262.800	12	281.688.486	Dinkes
25							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran	12	46.119.507.429	12	31.163.540.371	Dinkes
26					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang Menerapkan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan	Keluarga	Meminimalkan Wilayah Kantong					Dinkes

Sekretariat TKPK Kabupaten Sikka

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Strategi	Target 2025		Realisasi 2025		OPD Penanggungjawab
					BIDANG KESEHATAN	n Perilaku hidup sehat	Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat		Kemiskinan					
27	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat fondasi infrastruktur dasar yang inklusif, tangguh, dan terintegrasi, melalui penataan tata ruang,	Meningkatnya Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID) (Indeks)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBAN GAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Disusun	Dokumen	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan					PUPR
				Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur ke-PUan (%)												
28	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Memperkuat fondasi infrastruktur dasar yang inklusif, tangguh, dan terintegrasi, melalui penataan tata ruang,	Meningkatnya Akses Hunian Layak, terjangkau dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID) (Indeks)	PROGRAM PENGEMBAN GAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	12	503.697.400	6	300.784.800	DPKPP
29				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) (Angka)			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terbangun	Unit Rumah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	2	157.836.900	2	155.756.000	DPKPP

Sekretariat TKPK Kabupaten Sikka

No	Urusan Pemerintah / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Strategi	Target 2025		Realisasi 2025		OPD Penanggungjawab
							Program Kabupaten/ Kota									
30					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten /kota ditangani	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan					DPKPP
31					PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Perbaikan RTLH untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Jumlah RTLH untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10Ha yang diperbaiki	unit	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	68	2.336.693.900	68	1.959.855.700	DPKPP
32					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Pelanggan Listrik	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	21	4.565.001.900	21	3.356.488.112	DPKPP
33	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Membangun fondasi tata Kelola pemerintah melalui optimalisasi potensi daerah, penyelarasan dan penegakkan regulasi	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban	Indeks Risiko Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran	1	95.260.500	1	71.855.876	BPBD

Sekretariat TKPK Kabupaten Sikka

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Strategi	Target 2025		Realisasi 2025		OPD Penanggungjawab
		pusat dan daerah, serta peningkatan pengawasan dan akuntabilitas	masyarakat													
34				Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran	400	61.562.600	400	48.798.420	BPBD
35				Potensi Kerugian Ekonomi (Rp)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran	100	73.254.400	100	26.962.671	BPBD
				Potensi Kerugian Fisik (Rp)												
				Potensi Kerugian Lingkungan (Ha)												

Sekretariat TKPK Kabupaten Sikka

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Strategi	Target 2025		Realisasi 2025		OPD Penanggungjawab
				Indeks Ketahanan Daerah (Angka)												
36	Sosial	Membangun dasar kebijakan dan sistem pelayanan SDM yang inklusif, responsif, dan berbasis nilai lokal.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Angka Kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan PPKS	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	Meningkatkan Pendapatan	70	19.057.100	45	14.398.038	Dinsos
37				Pengeluaran Per Kapita			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	Mengurangi Beban Pengeluaran	20	26.286.700	20	12.725.195	Dinsos
38				Persentase Penduduk Miskin yang Tergraduasi (%)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan PPKS	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran	40	67.546.600	40	62.697.670	Dinsos
39				Persentase PPKS di Luar Panti Yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (%)			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran	35	47.977.800	38	34.705.568	Dinsos

Sekretariat TKPK Kabupaten Sikka

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Strategi	Target 2025		Realisasi 2025		OPD Penanggungjawab
							Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Kabupaten/Kota							
40				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Bekerjasama dengan Dinas Sosial (%)			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran	275	218.884.900	275	166.620.450	Dinsos
41				Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Saat Bencana (%)			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran	50	15.655.700	115	10.002.766	Dinsos
42							Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran	20	57.817.900		439.553	Dinsos

Sekretariat TKPK Kabupaten Sikka

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Strategi	Target 2025		Realisasi 2025		OPD Penanggungjawab
							Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									
43							Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran	12	12.079.500	12	6.889.448	Dinsos
44					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran	75	11.256.100	75	11.159.856	Dinsos
45							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	34.673,00	244.392.900	34.814	217.838.765	Dinsos
46							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	21000	92.060.800	84.501	82.747.285	Dinsos
47	Tenaga Kerja	Membangun dasar	Meningkatnya	Angka Kemiskinan	PROGRAM PENEMPATAN	Persentase Tenaga		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang	Orang	Meningkatkan	5	1.550.000		1.510.000	Disnakertrans

Sekretariat TKPK Kabupaten Sikka

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Strategi	Target 2025		Realisasi 2025		OPD Penanggungjawab
		kebijakan dan sistem pelayanan SDM yang inklusif, responsif, dan berbasis nilai lokal.	Kesempatan dan produktivitas tenaga kerja		TENAGA KERJA	Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		Pendapatan					
48				Pengeluaran Perkapita			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	Meningkatkan Pendapatan	20	7.484.000		340.000	Disnakertrans
49				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pemberi kerja yang menerapkan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial di dalam negeri dan luar negeri	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	Mengurangi Beban Pengeluaran	6	5.404.500	7	5.342.100	Disnakertrans
50				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	Orang	Meningkatkan Pendapatan	223	4.387.705.100	223	4.046.178.438	Disnakertrans
							Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Berbasis Kompetensi pada Tahun n							
51	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Membangun dasar kebijakan dan sistem pelayanan SDM yang	Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Lembaga	Mengurangi Beban Pengeluaran	10	7.398.600	10	6.293.317	DP2KBP3A

Sekretariat TKPK Kabupaten Sikka

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Strategi	Target 2025		Realisasi 2025		OPD Penanggungjawab
		inklusif, responsif, dan berbasis nilai lokal.	Perlindungan Anak		AN PEREMPUAN		Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan							
52			Terwujudnya Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Gender			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	12	16.245.000	12	15.862.050	DP2KBP3A
53				Usia Harapan Hidup	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Kabupaten Layak Anak	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	Meningkatkan Pendapatan	12	16.664.200	12	16.604.400	DP2KBP3A
				Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)												

Sekretariat TKPK Kabupaten Sikka

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Strategi	Target 2025		Realisasi 2025		OPD Penanggungjawab
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)												
				Indeks Ketahanan Keluarga Daerah												
54	Pangan	Membangun fondasi pengembangan sektor primer untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi biru	Meningkatnya ketersediaan dan Cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau.	Pertumbuhan sektor pertanian (%)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	Mengurangi Beban Pengeluaran		5.020.000		-	Dinas Ketahanan Pangan
55				Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	Meningkatkan Pendapatan	3	39.980.000	3	34.842.000	Dinas Ketahanan Pangan
56					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di Mutahirkan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan	Dokumen	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1	36.175.000	1	30.040.000	Dinas Ketahanan Pangan
							Pangan Kecamatan	Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Pangan yang Dimutahirkan							
57	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Membangun fondasi tata kelola pemerintah melalui optimalisasi potensi daerah,	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi	Indeks Pelayanan Publik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Penataan Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran	7	5.244.000	7	5.244.000	Dispendukcapil

Sekretariat TKPK Kabupaten Sikka

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Strategi	Target 2025		Realisasi 2025		OPD Penanggungjawab
		penyelarasan dan penegakkan regulasi pusat dan daerah, serta peningkatan pengawasan dan akuntabilitas	Kependudukan					Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia							
58				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	Mengurangi Beban Pengeluaran	56	19.128.200	56	19.108.200	Dispenduk capil
59				Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Dihasilkan (Angka)			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	Mengurangi Beban Pengeluaran	6	4.170.000	6	4.130.000	Dispenduk capil
60					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran	12	471.119.254	12	460.464.152	Dispenduk capil
61							Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran	15	24.252.100	6	24.219.380	Dispenduk capil

Sekretariat TKPK Kabupaten Sikka

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Strategi	Target 2025		Realisasi 2025		OPD Penanggungjawab
62							Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran	1	4.862.900	1	4.862.900	Dispendukcapil
63					PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran	1	2.416.700	1	2.416.700	Dispendukcapil
64	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Membangun fondasi pengembangan sektor primer untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat dan kemandirian Desa	Pertumbuhan sektor pertanian (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Peningkatan Desa Yang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif Dan Pemberdayaan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak Penyelenggaraan Gerakan PKK dalam Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak	Dokumen	Meningkatkan Pendapatan	23	32.673.200	23	32.565.100	DPMD
									PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan							
									Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga							
									Keluarga							
65				Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa Mandiri	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	181	30.649.965	181	30.614.800	DPMD

Sekretariat TKPK Kabupaten Sikka

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Strategi	Target 2025		Realisasi 2025		OPD Penanggungjawab
							Pemerintahan Desa									
66				Indeks Desa (Indeks)			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	362	108.241.488	362	108.117.788	DPMD
67							Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	362	146.519.775	362	146.431.904	DPMD
68	Perhubungan	Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan aksesibilitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID) (Indeks)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan	Unit	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1	14.139.000	1	13.838.000	Dishub
									Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia							
				Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)												
				Konektivitas Darat (Persentase)												
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)												

Sekretariat TKPK Kabupaten Sikka

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Strategi	Target 2025		Realisasi 2025		OPD Penanggungjawab
				Konektivitas Penyeberangan (Rasio)												
69	Perdagangan	Membangun fondasi pengembangan sektor primer untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya daya saing industri	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	Meningkatkan Pendapatan	50	21.624.600	50	17.065.000	Disperindag
			Meningkatnya Nilai Tambah Pedagang Melalui Peningkatan Kualitas dan Standar Produk	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto												
			Meningkatnya Kontribusi UMKM dalam Perekonomian	Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum												
				Pertumbuhan Sektor Perdagangan												
				Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase)												
				Kontribusi Sektor												

Sekretariat TKPK Kabupaten Sikka

No	Urusan Pemerintah / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Strategi	Target 2025		Realisasi 2025		OPD Penanggungjawab
				Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)												
				Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persentase)												
70	Perpustakaan	Membangun dasar kebijakan dan sistem pelayanan SDM yang inklusif, responsif, dan berbasis nilai lokal.	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	Meningkatkan Pendapatan	42	59.969.500	32	46.010.158	Disarsipus
				Harapan Lama Sekolah												
				Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik												
				Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)												
71	Perikanan	Membangun fondasi pengembangan sektor primer untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Pertumbuhan Sektor Primer	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Total Produksi Perikanan	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	Meningkatkan Pendapatan	150	9.045.939.500	150	8.955.320.327	Dinas Perikanan
72				Indeks Ketahanan Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah izin Usaha Perikanan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	Meningkatkan Pendapatan					Dinas Perikanan

Sekretariat TKPK Kabupaten Sikka

No	Urusan Pemerintah / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Strategi	Target 2025		Realisasi 2025		OPD Penanggungjawab
73				Pertumbuhan pendapatan nelayan (%)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	ton	Meningkatkan Pendapatan	37.550	727.078.100	28.998	272.671.000	Dinas Perikanan
				Pertumbuhan pendapatan pembudidaya ikan (%)												
74	Pertanian	Membangun fondasi pengembangan sektor primer untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kesejahteraan petani	Pertumbuhan Sektor Primer	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	Meningkatkan Pendapatan	7	204.559.300	7	177.335.690	Dinas Pertanian
75				Indeks Ketahanan Pangan			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	Meningkatkan Pendapatan	2	785.167.900	2	729.054.345	Dinas Pertanian
76				Indeks Kesejahteraan Petani (Indeks)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	Meningkatkan Pendapatan	2.000	197.937.500	1.910	165.473.700	Dinas Pertanian
77							Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	Meningkatkan Pendapatan	3	137.159.300	3	137.121.050	Dinas Pertanian

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Strategi	Target 2025		Realisasi 2025		OPD Penanggungjawab
78	Kewilayahan	Membangun dasar	Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	7	38.171.600	7	27.077.340	Kecamatan
		kebijakan dan sistem														
		pelayanan SDM yang														
		inklusif, responsif, dan														
		berbasis nilai lokal.														
79				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	15	3.356.000	15	-	Kecamatan

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah antara lain:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, melaksanakan 1 program yaitu Pengelolaan Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan, melaksanakan 2 program yaitu Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melaksanakan 1 program yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, melaksanakan 4 program yaitu Pengembangan Perumahan, Kawasan Permukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);

5. Dinas Sosial, melaksanakan 3 program yaitu Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, dan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
6. Dinas Ketahanan Pangan, melaksanakan 2 program yaitu Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Penanganan Kerawanan Pangan;
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaksanakan 3 program yaitu Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Pemenuhan Hak Anak (PHA);
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melaksanakan 4 program yaitu Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Profil Kependudukan;
9. Dinas Perhubungan, melaksanakan 1 program yaitu Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
10. Dinas Perikanan, melaksanakan 3 program yaitu Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
11. Dinas Pertanian, melaksanakan 2 program yaitu Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melaksanakan 2 program yaitu Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dan Administrasi Pemerintahan Desa;
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melaksanakan 3 program yaitu Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, dan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, melaksanakan 1 program yaitu Pembinaan Perpustakaan; dan
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan 1 program yaitu Penanggulangan Bencana.

16. Kecamatan melaksanakan 2 Program Yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Program yang dilaksanakan mencakup bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta penyediaan akses terhadap layanan dasar seperti Pendidikan, Kesehatan, air bersih, dan perumahan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, mencegah masyarakat rentan jatuh ke dalam kemiskinan, serta menciptakan mobilitas sosial ke atas bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Pemerintah terus mendorong integrasi data agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Strategi yang dilakukan tidak hanya bersifat kuratif (penanganan langsung), tetapi juga preventif (pencegahan kemiskinan baru) dan promotif (peningkatan kapasitas Masyarakat).

Rencana Aksi Tahunan (RAT)

Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten Sikka

Tahun 2026



BAB III

RENCANA AKSI TAHUNAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2026

- 3.1. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2026**
- 3.2. Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026**
- 3.3. Hambatan dan Tantangan terhadap Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026**

BAB III

RENCANA AKSI TAHUNAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2026

3.1 Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026

Strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka mengacu pada Permendagri 53 Tahun 2020, dimana penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - Memastikan kelompok miskin ekstrem memperoleh program perlindungan sosial;
 - Memastikan komplementaritas program perlindungan sosial pusat dan program di daerah;
 - Mengembangkan dan melaksanakan inovasi kebijakan program perlindungan sosial terutama untuk kelompok rentan, anak, penyandang disabilitas dan lansia;
 - Melibatkan multipihak, komunitas universitas dan swasta;
 - Meningkatkan akses masyarakat miskin ekstrem terkait pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan (NIK, Akta Kelahiran, dsb).
2. Peningkatan pendapatan masyarakat;
 - Membuka akses pada pekerjaan dan infrastruktur dasar yang layak;
 - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - Peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM;
 - Menyediakan dan mempermudah akses pembiayaan UMKM.
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan
 - Peningkatan akses layanan dasar;
 - Meningkatkan kenotifitas antar wilayah;
 - Mendorong konvergensi anggaran;
 - Memastikan konsolidasi program
 - Meningkatkan kerjasama multi pihak.

3.2 Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026

Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan menjadi bahan untuk pemetaan kondisi kemiskinan. Kemiskinan memiliki dimensi yang sangat kompleks tidak hanya terkait kemampuan ekonomi (konsumsi) masyarakat tetapi menyangkut status kehidupan sosial. Strategi penanggulangan kemiskinan yang menyasar secara langsung, tidak langsung maupun dari unsur penunjang di Kabupaten Sikka melalui program-program antara lain:

1. Program pengelolaan pendidikan;
2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
4. Program pengembangan perumahan;
5. Program penanggulangan bencana;
6. Program pemberdayaan sosial;
7. Program rehabilitasi sosial;
8. Program perlindungan dan jaminan sosial;
9. Program penempatan tenaga kerja;
10. Program hubungan industrial;
11. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
12. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan;
13. Program perlindungan Perempuan;
14. Program pemenuhan hak anak;
15. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan;
16. Program pendaftaran penduduk;
17. Program pencatatan sipil;
18. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
19. Program pengelolaan profil kependudukan;
20. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
21. Program administrasi pemerintahan desa;
22. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);

23. Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
24. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
25. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
26. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
27. Program Penyuluhan Pertanian.

Sumber pembiayaan program penanggulangan kemiskinan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non fisik, dengan rencana anggaran sebesar Rp109.495.225.698, yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah, yaitu :

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
5. Dinas Sosial;
6. Dinas Ketahanan Pangan;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Pertanian;
14. Dinas Perikanan; dan
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Matriks Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2026

No.	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target 2026		Sumber Dana
										Kinerja	Pagu (Rp.)	
1	Pendidikan	Membangun dasar kebijakan dan sistem pelayanan SDM yang inklusif, responsif, dan berbasis nilai lokal.	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Skor Literasi dan Numerasi Tingkat SD dan SMP	Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD, SD, SMP	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Wilayah Kabupaten Sikka	100%	57.537.687.358	DAU, DAK Non Fisik, DAK Fisik
						Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD, SMP						
						Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, SD, SMP						
						Angka Putus Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		100%	27.595.107.479	
						Persentase Satuan PAUD yang melaksanakan layanan HI						
2	Kesehatan	Membangun dasar kebijakan dan sistem pelayanan SDM yang inklusif, responsif, dan berbasis nilai lokal.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga	Jumlah Kematian Ibu	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Sikka	100%	13.473.396.411	DAU, DAK Non Fisik
				Jumlah Kematian Balita		Angka Kematian Bayi						
				Prevalensi Stunting		Prevalensi Wasting						
				Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat						
				Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap		Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun						
				Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional		Prevalensi Obesitas ≥ 18 tahun						
				Angka Keberhasilan Pengobatan TB		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan						

No.	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target 2026		Sumber Dana
										Kinerja	Pagu (Rp.)	
				Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar		Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN						
				Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup		Cakupan Imunisasi Rutin Lengkap						
						Penurunan Angka Kematian Dengue						
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat fondasi infrastruktur dasar yang inklusif, tangguh, dan terintegrasi, melalui penataan tata ruang,	Meningkatnya Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang merata dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Ke PU an	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Sikka	100%	467.948.800	DAU
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Memperkuat fondasi infrastruktur dasar yang inklusif, tangguh, dan terintegrasi, melalui penataan tata ruang,	Meningkatnya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Sikka	100%	455.889.600	DAU
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Membangun fondasi tata Kelola pemerintah melalui optimalisasi potensi daerah, penyalarsan dan penegakkan regulasi pusat dan daerah, serta	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Penanggulanga n Bencana	Persentase cakupan penanganan tangap daurat bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Sikka	100%	61.477.900	DAU
						Persentase penanganan	Pelayanan Penyelamatan	Persentase Pelaksanaan				

No.	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target 2026		Sumber Dana
										Kinerja	Pagu (Rp.)	
		peningkatan pengawasan dan akuntabilitas				tanggap darurat bencana	dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			364.413.900	
						Persentase penangana pasca bencana						
6	Sosial	Membangun dasar kebijakan dan sistem pelayanan SDM yang inklusif, responsif, dan berbasis nilai lokal.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Persentase Penduduk Miskin yang tergraduasi	Pemberdayaan Sosial	Persentase TKS/Relawan Sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Sikka	100%	76.977.100	DAU
						Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial						
						Persentase lembaga di bidang Kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial						
					Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		100%	322.466.300	
						Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti						
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan						

No.	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target 2026		Sumber Dana
						Dasarnya di luar Panti				Kinerja	Pagu (Rp.)	
						Dasarnya di luar Panti						
					Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		100%	13.566.000	
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100%	165.529.800	
7	Tenaga Kerja	Membangun dasar kebijakan dan sistem pelayanan SDM yang inklusif, responsif, dan berbasis nilai lokal.	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Wilayah Kabupaten Sikka	100%	17.724.350	DAU
						Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Luar Negeri	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		100%	20.784.500	
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (TPTK)	Hubungan Industrial	Persentase pemberi kerja yang menerapkan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial di dalam negeri dan luar negeri	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu)		100%	6.531.800	

No.	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target 2026		Sumber Dana
										Kinerja	Pagu (Rp.)	
					Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		100%	2.042.411.500	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Membangun dasar kebijakan dan sistem pelayanan SDM yang inklusif, responsif, dan berbasis nilai lokal.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Sikka	100%	69.360.000	DAU
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		Persentase Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	266.329.800	
					Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	19.865.300	
				Indeks Perlindungan Anak	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Skor Kabupaten Layak Anak	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Persentase Pelaksanaan Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerinta		100%	19.865.300	

No.	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target 2026		Sumber Dana
										Kinerja	Pagu (Rp.)	
							Kewenangan Kabupaten/Kota	h, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
9	Pangan	Membangun fondasi pengembangan sektor primer untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi biru	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (SKOR PPH)	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Sikka	100%	0	DAU
							Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		100%	185.430.600	
10	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Membangun fondasi tata Kelola pemerintah melalui optimalisasi potensi daerah, penyelarasan dan penegakkan regulasi pusat dan daerah, serta peningkatan pengawasan dan akuntabilitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan E-KTP Persentase Kepemilikan KIA Persentasi Aktivasi IKD	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelaksanaan Penataan Pendaftaran Penduduk	Wilayah Kabupaten Sikka	100%	8.497.600	DAU
					Pencatatan Sipil	Persentase akta kematian, akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		100%	28.069.400	
					Pengelolaan Informasi	Persentase informasi kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Pengumpulan		100%		

No.	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target 2026		Sumber Dana
										Kinerja	Pagu (Rp.)	
					Administrasi Kependudukan	yang dimanfaatkan	dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			332.253.800	
							Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100%	26.855.300	
					Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Penyusunan Profil Kependudukan		100%	7.745.600	
11	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Membangun fondasi pengembangan sektor primer untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa secara berkelanjutan	Indeks Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Wilayah Kabupaten Sikka	100%	68.422.500	DAU

No.	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target 2026		Sumber Dana
										Kinerja	Pagu (Rp.)	
								Kabupaten/Kota				
					Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100%	135.259.500	
						Persentase fasilitasi tata kelola desa						
12	Perhubungan	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan aksesibilitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau	Rasio Konektivitas	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Sikka	100%	53.636.000	DAU
						Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal						
13	Perdagangan	Membangun fondasi pengembangan sektor primer untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kontribusi Meningkatkan kontribusi KUMKM terhadap perekonomian daerah melalui penguatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Wilayah Kabupaten Sikka	100%	69.921.600	DAU

No.	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target 2026		Sumber Dana	
										Kinerja	Pagu (Rp.)		
14	Perikanan	Membangun fondasi pengembangan sektor primer untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	Pertumbuhan Pendapatan Nelayan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Sikka	100%	2.743.306.100	DAU	
				Pertumbuhan Pendapatan Pembudidaya Ikan	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase produk perikanan yang telah dijual dalam bentuk olahan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		100%	549.763.100		
15	Pertanian	Membangun fondasi pengembangan sektor primer untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Pertumbuhan Produksi Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penggunaan Sarana Pertanian	Wilayah Kabupaten Sikka	100%	2.099.774.100	DAU	
					Penyuluhan Pertanian	Produktivitas pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		100%	208.822.600		
TOTAL											109.495.225.698		

Sumber : Olahan Bapperida Kabupaten Sikka, 2025

Dari tabel 3.1, dapat diketahui kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan antara lain :

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
3. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota;
5. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
6. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
7. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
8. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
9. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
10. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar;
11. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
13. Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota;
14. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
15. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
16. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
17. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;

18. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
19. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
20. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;
21. Penataan Pendaftaran Penduduk;
22. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
23. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;
24. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
25. Penyusunan Profil Kependudukan;
26. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;
27. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
28. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
29. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan;
30. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota;
31. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
32. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
33. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

3.3 Hambatan dan Tantangan terhadap Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026

Hambatan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka yaitu :

1. Belum optimalnya peran Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
2. Sumber Daya Manusia pelaksana program penanggulangan kemiskinan masih belum optimal.
3. Adanya ego sektoral yang menyulitkan sinergi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
4. Ekonomi lokal belum tumbuh optimal, masih bergantung pada sektor informal.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka antara lain:

1. Mewujudkan *single* data kemiskinan, sehingga intervensi program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.
Implementasi sistem *single* data kemiskinan berbasis *by name by address* memungkinkan identifikasi yang tepat sasaran terhadap individu atau keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
2. Meningkatkan efektivitas program berbasis pemberdayaan.
Program-program yang memberikan pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta akses permodalan harus diperkuat untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Pelibatan komunitas lokal dan kelompok usaha bersama (KUBE) dapat menjadi strategi untuk memperkuat jaringan sosial dan ekonomi. Efektivitas program ini juga memerlukan monitoring dan evaluasi yang ketat agar dapat menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan nyata masyarakat.
3. Mengembangkan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah.
Kabupaten Sikka memiliki potensi unggulan di sektor pertanian, perikanan, pariwisata alam dan budaya, serta kerajinan tenun ikat yang khas. Pengembangan sektor-sektor ini secara terintegrasi dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.
4. Membangun kolaborasi lintas sektor dan multipihak.

Perlu adanya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (NGO), perguruan tinggi, sektor swasta, dan komunitas lokal. Melalui kemitraan ini, sumber daya, pengetahuan, dan inovasi dapat disinergikan untuk menghasilkan program yang lebih komprehensif dan berdampak.

5. Digitalisasi dan inovasi layanan dasar.

Digitalisasi layanan publik dapat mempercepat akses masyarakat miskin terhadap berbagai bantuan dan layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Inovasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pemberdayaan.

6. Pola pikir dan mental miskin masyarakat.

Selain faktor struktural dan teknis, aspek pola pikir dan mental masyarakat miskin juga menjadi tantangan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pola pikir miskin seringkali ditandai dengan sikap pasif, ketergantungan pada bantuan, rasa rendah diri, dan kurangnya kepercayaan diri untuk berusaha mandiri. Kondisi ini dapat muncul akibat pengalaman berulang dalam menghadapi kesulitan ekonomi, kurangnya pendidikan, dan terbatasnya akses informasi.

7. Di Kabupaten Sikka, sebagian masyarakat miskin mungkin masih menghadapi kendala psikologis yang menghambat mereka untuk mengambil inisiatif atau memanfaatkan peluang yang ada. Kecenderungan untuk lebih memilih menerima bantuan langsung tanpa berupaya mengembangkan usaha sendiri, atau takut mengambil risiko dalam berwirausaha. Mental ini dapat memperlambat proses pemberdayaan dan kemandirian ekonomi yang menjadi tujuan utama program penanggulangan kemiskinan.

Rencana Aksi Tahunan (RAT)

Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten Sikka

Tahun 2026



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dalam penanggulangan kemiskinan tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT), yang mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah. Dokumen ini memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam komitmen global yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta arahan perencanaan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan arahan perencanaan pembangunan di tingkat daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perencanaan yang telah tertuang dalam dokumen ini dijadikan acuan dalam pelaksanaan serta evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka.

4.2 Saran

Perlu ada komitmen dan kepedulian dari semua pihak untuk mendukung pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka.



SEKRETARIAT

TKPK

